

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PAHLAWAN EKONOMI NUSANTARA (PENA) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Malang)

M Fauzan Firjatullah¹, Suyeno², Langgeng Rachmatullah Putera³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: fauzanzozan288@gmail.com*

ABSTRAK

Kemiskinan tetap menjadi isu utama dalam pembangunan yang membutuhkan kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat agar meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), yang dibuat untuk memindahkan fokus penanganan kemiskinan dari memberikan bantuan sosial yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menuju memperkuat usaha-usaha produktif bagi masyarakat yang masih miskin. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana kebijakan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) diterapkan dalam usaha mengurangi kemiskinan, serta mengetahui pengaruh sosial dan ekonomi yang terjadi pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Malang. Data tersebut diperoleh melalui wawancara yang dalam, pengamatan langsung, serta pengumpulan dokumen yang melibatkan Dinas Sosial, pendamping sosial, dan keluarga yang menerima manfaat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana, sedangkan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan mengacu pada model Van Meter dan Van Horn. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PENA secara keseluruhan sudah sesuai dengan tujuan kebijakan, terutama karena adanya koordinasi antar pelaksana yang cukup baik serta komitmen dari pendamping dalam mendukung proses pemberdayaan masyarakat. Program ini memberikan manfaat positif seperti meningkatkan kemampuan berwirausaha, meningkatkan penghasilan dari usaha, memperkuat rasa percaya diri, meningkatkan kemandirian secara ekonomi, serta meningkatkan partisipasi sosial dari para penerima manfaat. Namun, dalam pelaksanaannya program tersebut masih mengalami beberapa hambatan, seperti kuota penerima manfaat yang terbatas, belum ada dana langsung dari APBN atau APBD yang didukung, intensitas pendampingan yang kurang memadai, serta pemahaman masyarakat tentang tujuan pemberdayaan yang belum optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program PENA membantu memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat yang miskin, meskipun peningkatan kemampuan dalam penerapan program masih memerlukan bantuan yang lebih baik, dukungan pembiayaan yang terus menerus, serta kerja sama yang lebih erat antar berbagai pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Program Pahlawan Ekonomi Nusantara; Pengentasan Kemiskinan; pemberdayaan Ekonomi; Kesejahteraan Masyarakat

Pendahuluan

Kemiskinan tetap menjadi salah satu rintangan terbesar dalam agenda pembangunan baik di tingkat global maupun nasional, karena berkaitan erat dengan ketidakmerataan dalam akses terhadap sumber daya, peluang ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Meskipun *Sustainable Development Goals (SDGS)* bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan pada tahun 2030, laporan Bank Dunia (2024) menunjukkan bahwa ratusan juta orang di seluruh dunia masih terjebak dalam situasi kemiskinan yang parah. Di Indonesia, masalah kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh pendapatan yang rendah, tetapi juga dikarenakan terbatasnya akses terhadap pendidikan, modal usaha, teknologi, dan kesempatan kerja yang produktif. Situasi ini memerlukan pergeseran paradigma kebijakan dari pendekatan yang bersifat filantropis menuju strategi yang memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Pemberdayaan ekonomi komunitas menjadi salah satu strategi yang diakui efektif dalam mengatasi kemiskinan karena menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. Dengan memperkuat kapasitas individu dan kelompok, masyarakat didorong untuk meluncurkan usaha yang produktif, meningkatkan daya saing, serta memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi. Sejalan dengan paradigma *people centered development* kebijakan pemberdayaan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk memperkuat keterampilan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu,

implementasi program pemberdayaan memerlukan dukungan kelembagaan, sumber daya, serta mekanisme pendampingan yang mampu menjamin tercapainya tujuan kebijakan secara optimal.

Sebagai salah satu bentuk kebijakan pemberdayaan sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengembangkan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang ditujukan pada keluarga miskin dan kelompok rentan untuk membangun kemandirian ekonomi melalui pengembangan usaha produktif. Program ini mengintegrasikan bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan usaha sebagai upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial konsumtif. Di Kabupaten Malang, implementasi Program PENA menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan yang pada Maret 2025 masih mencapai 240,54 ribu jiwa atau sebesar 8,98% dari total penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih memerlukan kebijakan yang mampu menghasilkan dampak ekonomi secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas usaha masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, implementasi Program PENA di Kabupaten Malang tidak terpisah dari berbagai dinamika yang memengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan. Keberhasilan program sangat tergantung pada kecocokan sasaran penerima manfaat, ketersediaan sumber daya, kerja sama antar lembaga, kualitas pendampingan, serta keterlibatan aktif keluarga penerima manfaat dalam mengembangkan usaha produktif. Di sisi lain, terdapat beberapa hambatan, seperti terbatasnya kuota penerima program, kurang optimalnya intensitas pendampingan, serta keterbatasan dukungan finansial yang dapat berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada rancangan program, tetapi juga pada kemampuan para pelaksana untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan yang efektif, sehingga tujuan pemberantasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi dapat dicapai secara maksimal.

Mesipun PENA telah dilaksanakan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, efektivitas implementasinya masih memerlukan kajian yang komprehensif, khususnya terkait pencapaian tujuan kebijakan, pemanfaatan sumber daya, koordinasi antarpelaksana, serta dampaknya terhadap peningkatan kemandirian ekonomi KPM. Evaluasi bagi implementasi program menjadi penting untuk mengidentifikasi fakto-faktor pendukung maupun kendala yang memengaruhi keberhasilan kebijakan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Kebijakan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) pada Dinas Sosial Kabupaten Malang serta mengkaji dampaknya terhadap upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang?
2. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari pelaksanaan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) terhadap peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Malang?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang?
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari pelaksanaan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) terhadap peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Malang.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan kajian keilmuan pada bidang kebijakan publik serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Temuan dari penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang efektifitas model pemberdayaan yang berorientasi pada keberlanjutan sosial-ekonomi, serta memberikan landasan empiris bagi pengembangan konsep *empowerment governance*, yaitu tata kelola kebijakan yang berfokus pada partisipasi, kolaborasi, dan keberlanjutan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Malang
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan masyarakat agar lebih tepat sasaran, adaptif terhadap kebutuhan lokal, dan berorientasi pada keberlanjutan hasil program.
 - b. Bagi Masyarakat Penerima Program
Penelitian ini dapat menjadi refleksi terhadap pengalaman partisipasi mereka dalam program, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran dan pentingnya kemandirian ekonomi dan kerja sama komunitas dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah langkah penting setelah suatu kebijakan ditetapkan, yaitu proses mengubah keputusan pemerintah menjadi tindakan nyata agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Keberhasilan implementasi menentukan apakah suatu kebijakan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Van Meter dan Van Horn (1975) mengartikan implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu serta organisasi pemerintah dan swasta dalam mencapai tujuan kebijakan. Sementara itu, Grindle (1980) menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*), sehingga keberhasilan kebijakan tidak hanya tergantung pada kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kondisi lingkungan, pelaku, dan kapasitas kelembagaan.

Model Impelementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn (1975) karena mampu menjelaskan hubungan anatara kebijakan yang telah ditetapkan dengan hasil implementasinya. Menurut Van Meter dan Van Horn keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan, yaitu kejelasan sasaran dan tujuan program sehingga dapat dipahami oleh seluruh pelaksana
2. Sumber Daya, meliputi SDM, anggaran, sarana prasarana, serta waktu yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan program.
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana, berkaitan dengan struktur organisasi, pembagian tugas, kewenangan, dan kemampuan institusi dalam melaksanakan kebijakan
4. Komunikasi Antarorganisasi, yaitu koordinasi dan penyampain informasi antar instansi maupun antar pelaksana agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif.
5. Disposisi atau Sikap Pelaksana, mencakup komitmen, pemahaman, serta kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan
6. Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik, yaitu faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, seperti kondisi masyarakat, dukungan pemerintah daerah, dan situasi ekonomi setempat.

Model ini dipakai sebagai pisau analisis dalam penelitian mengenai implementasi Program PENA di kabupaten Malang karena mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan program di lapangan.

Teori Pemberdayaan Masyarakat

Teori pemberdayaan (*empowerment theory*) melihat masyarakat sebagai subjek utama pembangunan yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidup melalui peningkatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, dan partisipasi dalam proses pembangunan. Menurut Adi (2018), pemberdayaan adalah proses yang meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok agar dapat mengatur sumber daya yang memengaruhi kehidupan mereka. Pandangan ini sejalan dengan Chambers (1997) yang melalui konsep *people centered development* menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan, bukan hanya penerima manfaat dari kebijakan. Dalam perspektif ini, keberhasilan suatu program pemberdayaan tidak hanya dilihat dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam membuat keputusan, memperluas akses ekonomi, membangun jejaring sosial, dan menciptakan kemandirian yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi menjadi pendekatan strategis dalam mengatasi kemiskinan karena dapat memperkuat kapasitas masyarakat untuk keluar dari ketergantungan pada bantuan sosial.

Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar serta memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Sen (1999), kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai rendahnya pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan kapabilitas (*capability deprivation*) yang menyebabkan seseorang tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi dasar dalam kehidupannya. Prespektif ini menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan masyarakat, bukan hanya melalui bantuan konsumtif. Sejalan dengan itu, Suharto (2019) menjelaskan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada penguatan perlindungan sosial yang bersifat produktif melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian dan kesejahteraan dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan pemberdayaan ekonomi, termasuk Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transformasi masyarakat dari penerima

bantuan sosial menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus sebab judul penelitian “Implementasi Kebijakan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan” membutuhkan pemahaman yang dalam terhadap proses, implementasi, serta makna kebijakan dalam konteks nyata. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dipakai untuk memahami subjek penelitian secara mendalam, apa adanya, dalam konteks sekarang dan tidak terpisah dari lingkungan alamiahnya (Sugiyono, 2022). studi kasus dipilih karena penelitian difokuskan pada suatu program kebijakan tertentu yang dianggap representatif dan relevan dalam usaha pengentasan kemiskinan berkelanjutan, sehingga dapat dianalisis secara komprehensif dan mendalam sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar pembahasan lebih terarah, dan sistematis. Fokus penelitian dalam pendekatan kualitatif berfungsi sebagai batasan masalah yang bersifat sementara dan dapat berkembang sesuai dengan temuan di lapangan, sehingga peneliti dapat menggali fenomena secara komprehensif berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan (Sugiyono, 2022).

Fokus penelitian dalam ini diarahkan pada analisis implementasi kebijakan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara dalam Upaya Pengentasn Kemiskinan di Kabupaten Malang. Fokus ini mencakup:

1. Implementasi kebijakan Program Pahlawan ekonomi Nusantara (PENA) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang. Berdasarkan prespektif teori implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Van Meter & Van Horn, tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh sejumlah variabel penting, yaitu:
 - a. Standar dan Tujuan kebijakan
 - b. Sumber Daya
 - c. Komunikasi Antar Organisasi
 - d. Karakteristik Pelaksana
 - e. Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik
2. Dampak sosial dan ekonomu dari pelaksana Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) terhadap peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis penting, yaitu:
 - a. Peningkatan kondisi ekonomi masyarakat,
 - b. Peningkatan kemandirian ekonomi,
 - c. Perubahan sosial masyarakat,
 - d. Keberlanjutan dampak program.

Situs dan Latar Penlitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Malang dengan melibatkan Dinas Sosial Kabupaten Malang sebagai instansi yang menjadi mitra penelitian, mengingat wilayah dan lembaga tersebut memiliki relevansi secara langsung terhadap penyelenggaraan Program PENA sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan. Adapun Kecamatan Poncokusumo ditetaokan sebagai lokasi penelitian dikarenakan wilayah tersebut merupakan salah satu sasaran pelaksanaan Program PENA dalam rangka pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemilihan lokasi di daerah Kabupaten Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam penelitian ini menggunakan Teknik Purpose Sampling. Teknik ini digunakan karena lokasi penelitian dipilih secara sengaja berdasarkan alasan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Waktu penelitian dilakukan selama September-Mei 2026, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, dan analisis.

Sumber Data

1. Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2022) menjelaskan bahwa data primer, adalah data yang didapat langsung dari sumber asli melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini ada sumber data yang didapat dari seseorang yang kita wawancara, sumber data ini disebut informan, informan meliputi:

Daftar Subjek dan Informan

No	Nama	Jabatan	Status
1	Gugus Adi Santoso	Staff Dinsis Kab. Malang/Ketua PKH	Informan
2	Eni Ismiati, S.E., M.Pd	PKH Poncokusumo	Informan
3	Putiatu Rohmah	Masyarakat KPM	Subyek

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

2. Data sekunder

Menurut (Sugiyono,2022) data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, berupa dokumen, arsip, dan laporan tertulis. Data ini digunakan untuk mendukung, melengkapi, dan membandingkan temuan dari data primer. Sumber data sekunder ini meliputi:

- a) Peraturan Kementerian Sosial (Permensos No.7, 2023 tentang Program Pahlawan Ekonomi Masyarakat)
- b) Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- c) Data Profil Kabupaten Malang (Kondisi Sosial Masyarakat, Tingkat Kemiskinan, Potensi Ekonomi Lokal)
- d) Dokumen Dinas Sosial Kabupaten Malang (Laporan Monitoring, Evaluasi, Data Penerima Manfaat, Surat Keputusan, Tim Pelaksanaan Program, Berita Acara)
- e) Literatur Ilmiah (Jurnal Kademik, Buku, Dokumen Kebijakan, Peraturan Perundang-undangan)

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengaplikasikan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung di Dinas Sosial Kabupaten Malang dan Kecamatan Poncokusumo untuk memahami dinamika implementasi Program PENA. Hasil observasi meliputi:

- a. Pelaksanaan Program PENA dilapangan
- b. Peran aktor pelaksana
- c. Kondisi penerima manfaat
- d. Dampak sosial ekonomi yang terlihat

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) untuk menggali data informan terkait implementasi program PENA. Jenis wawancara yang dipilih bersifat semi terstruktur atau mendalam agar peneliti dapat memperoleh jawaban yang lebih luas dan fleksibel sesuai topik penelitian. Wawancara ini dilakukan pada: a) Pejabat atau staff Dinas Sosial Kabupaten Malang, b) Pendamping atau fasilitator program PENA, c) Masyarakat penerima manfaat Program PENA, d) Informan pendukung lainnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian dilakukan sebagai data pendukung melalui pengambilan foto secara langsung selama proses penelitian yang melibatkan subjek dan informan penelitian. Selain itu, dokumentasi juga diperoleh dari pemanfaatan foto yang dipublikasikan pada media sosial resmi instansi maupun pihak terkait sebagai sumber informasi pendukung. Peneliti turut mengumpulkan berbagai materi audio visual, seperti rekaman video dan suara, selama kegiatan observasi lapangan berlangsung.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Analisis Interaktif yang dibuat oleh (Miles & Huberman, 2014), seperti yang diuraikan dalam buku *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Model ini melihat analisis data sebagai proses berulang (*cyclical*) dan saling terkait, di mana analisis tidak hanya dilakukan setelah data dikumpulkan, tetapi dimulai sejak tahap pra-lapangan, selama proses pengumpulan data, hingga laporan akhir penelitian sudah ditulis. Menurut (Miles & Huberman, 2014) analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur aktivitas utama yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan secara fleksibel dan menyesuaikan dengan perkembangan temuan di lapangan. Miles & Huberman (1994) menegaskan bahwa data yang dikumpulkan harus mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konteks sosial, perilaku, persepsi, maupun pengalaman informan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2) Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Miles, Huberman & Saldana menjelaskan bahwa pengurangan data adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah yang berasal dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, serta bukti empiris lainnya. Dalam penelitian ini, proses pengurangan dimulai saat peneliti mengumpulkan wawancara dengan Staff Dinas Sosial Kabupaten Malang, dan juga saat memeriksa dokumen Dinas Sosial. Data tersebut kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Alur kedua dalam analisis adalah penyajian data, yaitu upaya menyusun dan menyajikan data dalam bentuk informasi terorganisasi sehingga memungkinkan peneliti memahami pola hubungan antar temuan. Dalam penelitian ini, penyajian data (*data display*) dilakukan secara deskriptif melalui uraian naratif, tabel, dan

bagan yang menggambarkan proses implementasi program PENA di Kabupaten Malang. Penyajian data difokuskan pada temuan penelitian terkait mekanisme pelaksanaan program, peran Dinas Sosial dan Pendamping Sosial, proses penentuan sasaran penerima manfaat, bentuk pendampingan usaha, serta dampak sosial dan ekonomi terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

4) Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti sebenarnya sudah mulai menarik interpretasi awal mengenai pola. Hubungan sebab akibat, atau tema yang muncul dari data. Namun, kesimpulan tersebut bersifat sementara dan perlu diverifikasi secara berkelanjutan. Menurut Miles, Hubberman dan Saldana (2014), verifikasi dilakukan melalui berbagai cara, seperti: a) Meninjau ulang catatan lapangan, b) Triangulasi sumber data, c) Diskusi dengan informan atau rekan peneliti, d) Pemeriksaan atau konsistensi temuan dengan data lain, e) Penggunaan matriks untuk menguji kekuatan pola, f) mengidentifikasi bukti pendukung dan penyangkal

Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi, menurut (Sugiyono, 2013), menjelaskan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbeda sumber dengan berbagai cara, dan pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan adalah:

1. Triangulasi Sumber

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antara pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang, pendamping Program PENA, dan Keluarga Penerima Manfaat. Sebagai contoh, pihak Dinas Sosial menjelaskan bahwa tujuan Program PENA adalah meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan usaha produktif dan pendampingan. Informasi tersebut kemudian dikonfirmasi oleh pendamping sosial yang menjelaskan bahwa setelah bantuan diberikan, KPM tetap memperoleh monitoring. Selanjutnya informasi tersebut diperkuat oleh KPM yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima membantu pengembangan usaha serta meningkatkan pendapatan ekonomi.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informasi yang didapat dari wawancara diperiksa melalui observasi langsung serta didukung oleh dokumentasi seperti laporan program, data penerima manfaat, foto kegiatan, dan dokumen administrasi Program PENA di Dinas Sosial Kabupaten Malang.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan pengecekan data secara berulang pada waktu yang berbeda kepada informan yang sama. Hasil konfirmasi menunjukkan jawaban yang konsisten terkait implementasi Program PENA, manfaat yang diterima, serta kendala yang dihadapi, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang

a) Standar dan Tujuan Kebijakan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kabupaten Malang telah dirumuskan secara jelas dengan orientasi pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada bantuan sosial. Hal ini dibuktikan dengan data cakupan program yang telah menjangkau 230 penerima manfaat dengan beragam jenis usaha produktif, mulai dari warung sembako, peternakan, perdagangan, kuliner, hingga usaha jasa. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Sosial, ditemukan bahwa pelaksana program telah memahami secara normatif bahwa Program PENA berbeda dari bantuan sosial biasa karena diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, dengan mekanisme pengajuan oleh pendamping PKH, verifikasi oleh pemerintah daerah dan Kementerian Sosial, hingga pencairan bantuan sesuai prosedur yang telah diatur, termasuk pertemuan rutin dan verifikasi komitmen. Namun demikian, temuan juga mengungkap adanya kesenjangan pemahaman antara pelaksana dan sebagian penerima manfaat (KPM), di mana sejumlah KPM masih memandang program tersebut sebagai bantuan sosial serupa BLT, meskipun menyadari bahwa dananya digunakan untuk usaha. Kesenjangan ini kemudian dijumpai oleh peran pendamping sosial yang membantu menjelaskan tujuan, mekanisme, dan manfaat program kepada penerima manfaat, sehingga proses implementasi tetap dapat berjalan meskipun pemahaman konseptual masyarakat belum sepenuhnya kuat.

Dengan demikian pembahasan ini menghubungkan temuan tersebut dengan teori pelaksanaan kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yang menekankan bahwa kejelasan standar dan tujuan kebijakan adalah faktor penting keberhasilan pelaksanaan karena memberikan arahan jelas mengenai

sasaran yang ingin dicapai. Analisis memperlihatkan bahwa variabel standar dan tujuan kebijakan dalam pelaksanaan Program PENA di Kabupaten Malang telah berjalan cukup efektif, terlihat dari kesesuaian antara sasaran program (KPM berpotensi usaha) dengan tujuan pemberdayaan yang ditetapkan, serta dari tingkat pemahaman pelaksana yang baik mengenai orientasi program sebagai alat peningkatan kemandirian ekonomi, bukan hanya bantuan konsumtif. Pembahasan juga menegaskan bahwa Van Meter dan Van Horn tidak hanya menekankan pemahaman pelaksana, tetapi juga sejauh mana tujuan kebijakan dipahami oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, perbedaan pemahaman di antara beberapa KPM menjadi catatan penting yang menunjukkan bahwa pengenalan tujuan kebijakan kepada kelompok sasaran belum sepenuhnya optimal, meskipun adanya pendamping sosial dapat mengurangi masalah tersebut melalui perannya sebagai agen komunikasi kebijakan. Dengan demikian, pembahasan menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan Program PENA tidak hanya dipengaruhi oleh substansi kebijakan yang jelas, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam menyampaikan tujuan tersebut kepada masyarakat sasaran, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif agar tujuan program dipahami secara keseluruhan sebagai langkah strategis menuju kemandirian usaha dan kesejahteraan berkelanjutan.

b) Sumber Daya

Temuan penelitian pada penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PENA di Kabupaten Malang ditopang oleh keterlibatan Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta dukungan pihak eksternal, yang bersama-sama memungkinkan program berjalan dari identifikasi calon penerima manfaat hingga monitoring pasca bantuan. Dari aspek sumber daya manusia, pendamping PKH ditemukan memegang peran sentral karena tidak hanya bertugas mendata dan mengajukan calon penerima, tetapi juga melakukan asesmen, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi usaha KPM secara berkala, sebagaimana disampaikan pendamping bahwa pemantauan dilakukan minimal dua bulan sekali.

Dari aspek sumber daya finansial, temuan mengungkap bahwa pendanaan Program PENA justru lebih dominan berasal dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Indonesia dibandingkan dari APBN maupun APBD, suatu kondisi yang menarik mengingat secara normatif program pemerintah semestinya didukung anggaran negara atau daerah. Selain itu, ditemukan pula keterbatasan sumber daya berupa terbatasnya kuota penerima manfaat terlihat dari banyaknya usulan KPM yang tidak diloloskan meskipun memenuhi kriteria serta keterbatasan waktu pelaksanaan, di mana pendamping hanya diberi tenggat 14 hari untuk proses pengajuan dan realisasi bantuan meski jumlah KPM yang diajukan cukup banyak.

Pembahasan pada penelitian ini menghubungkan temuan tersebut dengan model pelaksanaan kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yang menempatkan sumber daya sebagai faktor penentu keberhasilan kebijakan mencakup aspek finansial, manusia, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana. Ditegaskan bahwa keberhasilan Program PENA tidak hanya tergantung pada anggaran, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia yang dapat menerjemahkan tujuan kebijakan ke tindakan nyata, sesuai dengan teori pemberdayaan Ife (1995) tentang pentingnya fasilitator. Kuatnya pendanaan CSR dibandingkan APBN/APBD dinilai mencerminkan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan kenyataan pelaksanaan serta berpotensi menyebabkan ketidakpastian keberlanjutan program, sedangkan keterbatasan kuota dan waktu dipandang mengurangi kemampuan kebijakan untuk menjangkau kelompok sasaran secara optimal sehingga keberhasilan implementasi ditentukan tidak hanya oleh desain kebijakan, tetapi juga kecukupan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan nyata masyarakat sasaran.

c) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan bahwa implementasi Program PENA di Kabupaten Malang melibatkan struktur organisasi berjenjang, meliputi Kementerian Sosial selaku perumus kebijakan, Dinas Sosial Kabupaten Malang selaku pelaksana daerah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) selaku pelaksana teknis di lapangan, serta pihak eksternal melalui skema *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pembagian tugas antaraktor tercermin dari alur kerja yang sistematis, mulai dari identifikasi calon penerima manfaat, penyusunan usulan, verifikasi, hingga pencairan bantuan.

Karakteristik organisasi pelaksana juga tercermin dari intensitas koordinasi antara pendamping dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang terjalin melalui pertemuan rutin bulanan serta kedekatan hubungan sosial di tingkat komunitas. Meskipun demikian, temuan penelitian mengidentifikasi kendala berupa minimnya transparansi informasi terkait penolakan usulan penerima manfaat serta ketidakjelasan kuota, yang mengindikasikan koordinasi kelembagaan dan aliran informasi belum sepenuhnya optimal.

Pembahasan pada penelitian ini menempatkan temuan tersebut dalam kerangka Van Meter & Van Horn (1975), yang menegaskan bahwa karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur, kapasitas, pembagian kewenangan, dan mekanisme koordinasi. Kejelasan pembagian tugas dinilai selaras dengan pandangan Ripley dan Franklin tentang pentingnya fungsi administratif dan koordinatif organisasi, sementara kedekatan hubungan pendamping KPM sejalan dengan perspektif pemberdayaan Ife (1995) yang menempatkan pelaksana sebagai fasilitator, bukan sekadar birokrasi formal. Namun demikian,

ketergantungan tinggi terhadap pendamping sebagai sumber informasi tunggal serta keterbatasan koordinasi vertikal menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan masih memerlukan penguatan agar efektivitas implementasi Program PENA dapat berkelanjutan.

d) Sikap Para Pelaksana

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana Program PENA di Kabupaten Malang memiliki sikap yang relatif positif, tercermin dari pemahaman bahwa program ini bukan sekadar bantuan sosial konsumtif, melainkan instrumen untuk menciptakan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Sikap tersebut diperkuat oleh komitmen pelaksana dalam mengubah pola pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bersedia beralih dari ketergantungan bantuan sosial menuju usaha mandiri, meskipun menghadapi resistensi dari sebagian penerima manfaat.

Komitmen positif tersebut juga tercermin dari intensitas pendampingan dan monitoring yang tetap dilakukan setelah bantuan dcairkan, dengan sebagian besar KPM dampingan menunjukkan perkembangan usaha yang cukup baik. Meskipun demikian, temuan penelitian turut mengungkap adanya ketidakpuasan pelaksana terhadap aspek administratif, khususnya terkait keterbatasan kuota dan minimnya transparansi proses seleksi proposal, namun kondisi ini tidak mengurangi komitmen mereka dalam menjalankan tugas pendampingan.

Pembahasan yang ditemukan pada penelitian mengaitkan temuan tersebut dengan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang menegaskan bahwa sikap pelaksana (*disposition of implementers*) berkaitan dengan tingkat penerimaan, pemahaman, dan komitmen terhadap tujuan kebijakan, serta menentukan efektivitas implementasi bahkan ketika terdapat hambatan pada aspek lain seperti sumber daya. Sikap positif pelaksana ini juga dimaknai sejalan dengan teori pemberdayaan Ife (1995) mengenai peran fasilitator dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, serta pandangan Chambers (1997) tentang *people centered development* dan Sumodiningrat (2009) tentang pentingnya konsistensi pendampingan. Dengan demikian, komitmen, kepedulian, dan kesediaan pelaksana untuk tetap menjalankan fungsi pemberdayaan meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan menjadi salah satu factor pendukung utama keberhasilan implementasi Program PENA dalam upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

e) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa dari aspek sosial, implementasi Program PENA di Kabupaten Malang masih dihadapkan pada budaya ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial, sehingga upaya mengubah pola pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menuju kemandirian usaha menjadi tantangan tersendiri bagi pendamping. Dari aspek ekonomi, program ini terbukti relevan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses permodalan, dibuktikan dengan peningkatan pendapatan dan kemandirian usaha sebagian penerima manfaat setelah memperoleh bantuan.

Dari aspek politik, temuan penelitian mengungkap bahwa keberlangsungan Program PENA sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial, dalam hal seleksi proposal dan penentuan kuota penerima manfaat. Kendala yang muncul lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan kuota dan minimnya kewenangan pemerintah daerah maupun pendamping dalam menentukan penerima bantuan, sehingga tidak seluruh usulan yang telah memenuhi kriteria dapat disetujui.

Dengan demikian temuan tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan Chambers (1997), yang mengatakan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pendapatan, tetapi juga kurangnya akses, kemampuan, dan posisi tawar masyarakat, sehingga keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan, tetapi juga kemampuan untuk mendorong perubahan kesadaran masyarakat. Dari sisi ekonomi, temuan dinilai sejalan dengan Sumodiningrat (2009) tentang pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat memanfaatkan sumber daya secara mandiri, meskipun keberlanjutannya masih dibayangi keterbatasan kemampuan manajerial usaha dan fluktuasi pasar. Sementara itu, dari aspek politik dan kelembagaan, pembahasan merujuk pada pandangan Hall (2019) mengenai pembangunan berkelanjutan, yang menegaskan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan turut ditentukan oleh dukungan kelembagaan dan kebijakan yang adaptif, sehingga perluasan jangkauan program dan penguatan koordinasi antarlembaga menjadi kebutuhan penting agar tujuan pemberdayaan dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

2. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pelaksanaan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) Terhadap Peningkatan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat

a. Dampak Ekonomi

Hasil penelitian pada penelitian menunjukkan bahwa Program PENA di Kabupaten Malang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meskipun tingkat keberhasilan yang dicapai masih bervariasi antarpenerima manfaat. Dampak ekonomi tersebut tidak hanya tercermin dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari

perubahan status ekonomi KPM dari pekerja menjadi pelaku usaha mandiri, yang dalam perspektif teori pemberdayaan Chambers mencerminkan tahap awal *empowerment* ketika masyarakat mulai memperoleh akses terhadap sumber daya produktif. Namun demikian, temuan penelitian juga mengungkap bahwa dampak ekonomi belum sepenuhnya merata, karena peningkatan pendapatan turut dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam mengelola usaha, jenis usaha yang dijalankan, serta dukungan pendampingan yang diterima.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Program PENA penting untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Malang, yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai sekitar 240,54 ribu jiwa atau 8,9% dari total populasi pada tahun 2025. Dalam kaitannya dengan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), program ini dianggap sesuai dengan tujuan pertama (No Poverty) dan tujuan kedelapan (Decent Work and Economic Growth), karena tidak hanya fokus pada bantuan sementara, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi melalui pengembangan usaha produktif.

Lebih lanjut, dampak ekonomi Program PENA juga dimaknai sejalan dengan teori pengentasan kemiskinan yang menekankan bahwa kemiskinan tidak semata disebabkan oleh rendahnya pendapatan, melainkan juga keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, sehingga program ini merepresentasikan pergeseran pendekatan kebijakan dari bantuan sosial pasif menuju penguatan kapasitas ekonomi yang lebih produktif. Meskipun demikian, pembahasan turut menyoroti bahwa dampak ekonomi yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal karena sebagian usaha KPM masih mengalami ketidakstabilan pendapatan, sehingga penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan dinilai memerlukan dukungan berkelanjutan berupa pendampingan, pelatihan kewirausahaan, dan penguatan akses pasar agar tercipta peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

b. Dampak Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PENA di Kabupaten Malang tidak hanya memberikan pengaruh pada aspek ekonomi, tetapi juga menghasilkan dampak sosial yang bersifat positif, khususnya dalam meningkatkan rasa percaya diri, menumbuhkan motivasi berwirausaha, serta mendorong pergeseran pola pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ke arah kemandirian. Dalam perspektif teori pemberdayaan Robert Chambers, kondisi ini mencerminkan proses *empowerment* pada dimensi psikologis dan sosial, ketika individu mulai memiliki kontrol terhadap keputusan ekonomi yang diambil. Meskipun demikian, temuan penelitian juga mengungkap bahwa dampak sosial yang dihasilkan masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya merata, dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi KPM yang beragam serta budaya ketergantungan terhadap bantuan sosial yang masih melekat di sebagian masyarakat.

Dengan demikian penelitian ini menekankan bahwa Program PENA tidak hanya berfungsi sebagai alat bantuan sosial, tetapi juga sebagai cara untuk mengubah masyarakat menuju kemandirian dan peningkatan kemampuan diri, sesuai dengan konsep pemberdayaan yang menyoroti penguatan kemampuan individu maupun kelompok dalam mengatur dan mengelola kehidupan mereka sendiri. Terkait dengan konsep penanganan kemiskinan berbasis pemberdayaan, program ini dianggap menciptakan kesempatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang produktif, sehingga terjalin penguatan hubungan sosial antara pemerintah, pendamping, dan penerima manfaat, selain dari peningkatan pendapatan.

Namun demikian, pembahasan turut menyoroti bahwa perubahan sosial yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal karena Sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir yang bergantung pada bantuan sosial pemerintah, sehingga proses perubahan tersebut dinilai membutuhkan waktu yang panjang dan tidak dapat dicapai hanya melalui intervensi ekonomi semata. Oleh karena itu, dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, keberhasilan Program PENA dalam menciptakan dampak sosial yang lebih luas memerlukan proses pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan agar masyarakat mampu membangun kesadaran, kemandirian, dan partisipasi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

c. Kemandirian Ekonomi KPM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi, sebagai sasaran pokok Program PENA, telah dicapai oleh sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tercermin dari kemampuan mereka menjalankan usaha secara mandiri tanpa lagi bergantung pada pihak lain. Dalam perspektif teori pemberdayaan Robert Chambers, kondisi ini menunjukkan bahwa KPM telah memasuki tahap awal hingga menengah proses *empowerment*, yaitu ketika individu tidak hanya memperoleh akses terhadap sumber daya, tetapi juga mulai memiliki kontrol atas aktivitas ekonomi yang dijalankan. Namun demikian, temuan penelitian juga mengungkap bahwa tingkat kemandirian yang dicapai masih bersifat relatif dan belum sepenuhnya stabil, ditandai dengan fluktuasi aktivitas usaha serta pengaruh faktor kontekstual seperti latar belakang pendidikan, pengalaman usaha, dan kondisi lingkungan ekonomi lokal.

Pembahasan pada penelitian ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi merupakan salah satu tujuan utama Program PENA, yaitu menciptakan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup

melalui usaha produktif tanpa bergantung secara terus-menerus pada bantuan sosial pemerintah. Dalam perspektif teori pemberdayaan masyarakat, kemandirian ekonomi dimaknai sebagai bentuk keberhasilan pemberdayaan yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi, mengambil keputusan, dan mempertahankan keberlangsungan usaha secara mandiri.

Meskipun demikian, pembahasan juga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian ekonomi KPM masih belum sepenuhnya optimal karena beberapa usaha yang dijalankan masih mengalami keterbatasan dalam pengembangan usaha dan kestabilan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembentukan kemandirian ekonomi tidak bisa dicapai hanya dengan memberikan bantuan modal usaha, tetapi memerlukan pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan, sejalan dengan konsep penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan yang menjadikan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan dengan dukungan pelatihan kewirausahaan, peningkatan akses pasar, serta pembinaan usaha yang berkelanjutan.

d. Keberlanjutan Program

Pada penelitian ini keberlanjutan Program PENA di Kabupaten Malang masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pengukuran keberhasilan maupun kondisi riil usaha Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lapangan. Dari sisi pelaksana, indikator keberhasilan program masih lebih banyak dilihat dari aspek administratif, yaitu jumlah KPM yang mengalami graduasi, sementara graduasi tersebut tidak selalu mencerminkan bahwa KPM telah mencapai kondisi ekonomi yang stabil dan mandiri. Kondisi ini diperkuat oleh temuan bahwa usaha yang dijalankan KPM masih menghadapi fluktuasi, sehingga keberhasilan program tidak dapat hanya diukur dari keberhasilan awal pemberian bantuan, tetapi juga dari kemampuan KPM mempertahankan usahanya dalam jangka panjang.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan Program PENA dapat dilihat dari sejauh mana program mampu menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi serta mampu mempertahankan usaha setelah bantuan diberikan, sehingga keberhasilan program semestinya diukur tidak hanya dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dikaitkan dengan konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)*, program ini dinilai relevan dengan tujuan pertama (*No Poverty*) dan tujuan kedelapan (*Decent Work and Economic Growth*), sehingga dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat masyarakat.

Meskipun demikian, pembahasan turut menyoroti bahwa keberlanjutan program masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pengembangan usaha, kestabilan pendapatan, dan ketergantungan terhadap pendampingan, yang menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan memerlukan proses berkelanjutan dan tidak dapat dicapai hanya melalui pemberian bantuan modal usaha semata. Oleh karena itu, penguatan program melalui pelatihan kewirausahaan, perluasan akses pasar, dan pendampingan berkelanjutan dinilai diperlukan agar tujuan Program PENA dalam menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Merujuk pada temuan penelitian serta uraian pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang
 - a. Standar dan Tujuan Kebijakan: Tujuan program telah dipahami baik oleh pelaksana sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, namun belum sepenuhnya diinternalisasi oleh seluruh penerima manfaat.
 - b. Sumber Daya: Program ditopang sumber daya manusia yang cukup memadai, tetapi pendanaan masih bergantung pada CSR eksternal dan terkendala keterbatasan kuota serta waktu pelaksanaan.
 - c. Karakteristik Organisasi Pelaksana: Struktur organisasi berjenjang dengan pembagian tugas cukup jelas namun koordinasi vertikal dan kemandirian informasi di masyarakat masih perlu diperkuat.
 - d. Sikap Para Pelaksana: Pelaksana menunjukkan komitmen dan sikap positif yang konsisten dalam mendampingi penerima manfaat meskipun menghadapi keterbatasan.
 - e. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik: Implementasi masih dihadapkan pada budaya ketergantungan sosial masyarakat, sementara keberlangsungan program sangat bergantung pada kebijakan dan kewenangan pemerintah pusat.
2. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pelaksanaan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) Terhadap Peningkatan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Dampak Ekonomi: Program memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha KPM, namun keberhasilannya masih bervariasi dan belum sepenuhnya optimal.
 - b. Dampak Sosial: Program mendorong peningkatan rasa percaya diri, motivasi berwirausaha, dan pergeseran pola pikir masyarakat, meskipun dampaknya masih terbatas dan belum merata di seluruh

KPM.

- c. Kemandirian Ekonomi KPM: Sebagian KPM telah mampu menjalankan usaha secara mandiri, tetapi tingkat kemandirian yang dicapai masih relatif dan belum sepenuhnya stabil
- d. Keberlanjutan Program: Keberlanjutan program masih menghadapi tantangan berupa ketidakstabilan usaha dan ketergantungan pada pendampingan, sehingga memerlukan dukungan dan keberlanjutan agar tujuan pemberdayaan tercapai secara optimal

Saran

1. Bagi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Malang, Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Malang diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi Program PENA melalui penguatan sosialisasi, penganggaran dari APBD atau APBN, pelatihan kewirausahaan, dan pembinaan usaha secara berkelanjutan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama dengan pihak lain, seperti lembaga pelatihan dan sektor swasta, guna mendukung pengembangan usaha masyarakat serta memperluas akses pemasaran produk usaha KPM.
2. Bagi Pendamping PKH, Pendamping PKH diharapkan tidak hanya berfokus pada monitoring dan pengawasan program, tetapi juga lebih aktif dalam memberikan pendampingan usaha, motivasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kemandirian ekonomi. Pendamping juga perlu meningkatkan intensitas komunikasi dan pembinaan agar masyarakat lebih memahami tujuan Program PENA sebagai program pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar bantuan sosial biasa
3. Bagi Masyarakat KPM, Masyarakat penerima Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) diharapkan memanfaatkan bantuan usaha yang diberikan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga, bukan hanya sebagai bantuan sementara. KPM juga diharapkan memiliki keinginan untuk terus mengembangkan usaha secara mandiri, aktif mengikuti pendampingan dan pelatihan yang diberikan, serta mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi usaha agar usaha yang dijalankan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas penelitian tentang program PENA dengan area yang lebih luas dan menggunakan metode penelitian yang lebih mendalam agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang efektivitas program. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat terfokus pada analisis keberlanjutan usaha KPM, dampak jangka panjang program terhadap kesejahteraan masyarakat, serta strategi penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Kiki, E. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Patilaiya, H., Sinurat, J., Sarasati, B., Jumiati, S., Supriatna, A., Harto, B., Siburian Mahaza, U. D., Maesarini, I. W., & Hapsari, T. D. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat: Teori Pemberdayaan Masyarakat* (R. M. Sahara (ed.); 1st ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Sachs, J. D. (2012). From millennium development goals to sustainable development goals. *The Lancet*, 379(9832), 2206–2211. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60685-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60685-0)
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In M. Nizar (Ed.), *Analisis Kebijakan Publik*. AURA.
- Latifah, E. (2011). Harmonisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Yang Berorientasi Pada Millennium Development Goals. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 402–413. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.168>

Buku

- Miles, Huberman, & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publication. file:///C:/Users/ACER/Downloads/Qualitative Data Analysis_ A Methods Sourcebook (PDFDrive).pdf
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy implementation and bureaucracy* (2nd ed.). Dorsey Press.
- Solichin Abdul Wahab. (2017). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. PT Bumi Aksara
- Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. In J. Harsono & Desriyanti (Eds.), *UM Jakarta Press*. Penerbit Samudra Biru.
- Embang, A. E. (2025). *Pembangunan Berkelanjutan*. In A. P. Hawari (Ed.), *ILPPM UPN VETERAN YOYAKARTA* 951–952. (1st ed., Vol. 5, Issue 1). PT Media Penerbit Indonesia.

